



Integrasi Akhlaq Islami dalam Sistem Hukum Nasional untuk Meningkatkan Moralitas Publik

Nuruddin Hady

FISIP Universitas Negeri Malang
hadydiens@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.55656/tjmes.v7i2.417>

Disubmit: (2025-06-02) | Direvisi: (2025-06-15) | Disetujui: (2025-06-20)

Abstract

The integration of Islamic morals (akhlaq Islami) into the national legal system aims to enhance public morality through the enforcement of Islamic moral and ethical values. Akhlaq Islami, which includes principles of honesty, justice, and social responsibility, is considered crucial for application in various aspects of societal life, including the legal system. The implementation of akhlaq Islami in law can strengthen the moral foundation of society, increase legal awareness, and reduce crime rates. This integration also promotes the creation of a more harmonious and just social environment. This research is a qualitative study with a descriptive-analytical approach. The qualitative approach is used because this study focuses on an in-depth exploration of concepts, perceptions, and experiences related to the integration of akhlaq Islami in the national legal system. The research findings indicate that Indonesian society generally supports the integration of Islamic values into the legal system, as they believe that the principles of akhlaq Islami can improve individual morality and legal justice. Although there are concerns about inconsistency and discrimination, public support remains important. Legal education that integrates Islamic values can shape more ethical students, although its implementation is still limited. The main challenges are differences in interpretation, resistance from secular groups, and lack of political support, which require dialogue and cooperation. The role of religious scholars (ulama) and religious institutions is crucial in shaping legal policies that align with Islamic values.

Keywords: Islamic akhlaq, national legal system, public morality, justice, law enforcement

Abstrak

Integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional bertujuan untuk meningkatkan moralitas publik melalui penegakan nilai-nilai moral dan etika Islami. Akhlaq Islami, yang meliputi prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, dianggap penting untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem hukum. Penerapan akhlaq Islami dalam hukum dapat memperkuat fondasi moral masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum, dan mengurangi tingkat kejahatan. Integrasi ini juga mendorong terbentuknya lingkungan sosial yang lebih harmonis dan adil. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi mendalam tentang konsep, persepsi, dan pengalaman terkait integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia umumnya mendukung integrasi nilai-



nilai Islami dalam sistem hukum, karena mereka percaya bahwa prinsip-prinsip akhlaq Islami dapat meningkatkan moralitas individu dan keadilan hukum. Meski ada kekhawatiran tentang inkonsistensi dan diskriminasi, dukungan masyarakat tetap penting. Pendidikan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai Islami dapat membentuk karakter mahasiswa yang lebih etis, meski implementasinya masih terbatas. Kendala utama adalah perbedaan interpretasi, resistensi kelompok sekuler, dan kurangnya dukungan politik, yang memerlukan dialog dan kerjasama. Peran ulama dan lembaga keagamaan sangat penting dalam membentuk kebijakan hukum yang selaras dengan nilai-nilai Islami.

Kata Kunci: Akhlaq Islami, sistem hukum nasional, moralitas publik, keadilan, penegakan hukum

Pendahuluan

Integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional adalah konsep yang bertujuan untuk menyelaraskan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Islam dengan kerangka hukum yang berlaku di suatu Negara (Amsori, 2016). Upaya ini dianggap penting dalam rangka meningkatkan moralitas publik, yang mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pendekatan ini tidak hanya relevan tetapi juga memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat.

Akhlaq Islami adalah konsep yang luas dan mendalam dalam Islam, yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia (Mustopa, 2018). Akhlaq, yang sering diterjemahkan sebagai moral atau etika, merujuk pada sifat-sifat baik yang diajarkan dalam Islam dan bagaimana sifat-sifat tersebut diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Prinsip-prinsip akhlaq Islami seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan tanggung jawab sosial, adalah inti dari ajaran Islam yang diharapkan dapat membentuk karakter individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sistem hukum nasional, di sisi lain, adalah kerangka hukum yang berlaku di suatu negara, yang terdiri dari undang-undang, peraturan, dan lembaga penegak hukum. Tujuan utama dari sistem hukum adalah untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, serta melindungi hak-hak individu. Namun, sering kali sistem hukum menghadapi tantangan dalam penegakan nilai-nilai moral yang lebih mendalam, yang tidak hanya sekadar tertulis dalam undang-undang tetapi juga terkait dengan perilaku dan sikap individu dalam masyarakat.

Pentingnya integrasi akhlaq Islami. Integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk memperkuat fondasi moral masyarakat. Ketika nilai-nilai akhlaq Islami diintegrasikan ke dalam hukum, diharapkan bahwa perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut akan lebih dihargai dan didorong, sehingga membentuk masyarakat yang lebih bermoral dan beretika.

Kedua, untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip akhlaq Islami, masyarakat tidak hanya akan mematuhi hukum karena takut akan sanksi, tetapi juga karena kesadaran akan pentingnya nilai-nilai moral tersebut. Ini dapat membantu mengurangi pelanggaran hukum dan meningkatkan rasa tanggung jawab sosial di kalangan individu.

Ketiga, untuk mengurangi tingkat kejahatan. Penerapan nilai-nilai akhlaq Islami seperti kejujuran dan keadilan dalam sistem hukum dapat membantu mengurangi motivasi untuk melakukan tindakan kriminal. Misalnya, keadilan dalam hukum pidana dan perdata dapat memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya dan diperlakukan dengan adil, sehingga mengurangi ketidakpuasan dan potensi konflik dalam masyarakat.

Tantangan dan strategi integrasi. Integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional tentu saja tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyelaraskan nilai-nilai Islami dengan prinsip-prinsip hukum yang sudah ada, yang mungkin berasal dari tradisi hukum yang berbeda (Ali Fauzi et al., 2023). Misalnya, hukum nasional di banyak negara sering kali dipengaruhi oleh sistem hukum Barat, yang mungkin memiliki perbedaan mendasar dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Selain itu, ada tantangan dalam hal penerimaan dan pemahaman masyarakat. Tidak semua anggota masyarakat mungkin memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai akhlaq Islami, sehingga pendidikan dan sosialisasi menjadi penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana penerapannya dapat membawa manfaat bagi mereka dan masyarakat secara keseluruhan (Sumarta et al., 2022).

Strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dapat mencakup beberapa langkah. Pertama, dialog antara ulama, pembuat kebijakan, dan penegak hukum sangat penting untuk menemukan titik temu antara nilai-nilai Islami dan prinsip-prinsip hukum nasional. Kolaborasi ini dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Kedua, pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya akhlaq Islami harus ditingkatkan. Program-program pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai akhlaq Islami sejak dini dapat membantu membentuk karakter individu yang baik. Selain itu, sosialisasi melalui media massa dan kampanye publik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, penguatan lembaga penegak hukum juga diperlukan. Lembaga-lembaga ini harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menegakkan hukum yang selaras dengan nilai-nilai Islami. Ini termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip akhlaq Islami dan bagaimana menerapkannya dalam konteks penegakan hukum.

Manfaat integrasi akhlaq Islami. Integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional memiliki berbagai manfaat yang signifikan. Pertama, dapat meningkatkan kualitas hidup

masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih harmonis dan adil. Kedua, dapat memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Nilai-nilai akhlaq Islami mendorong individu untuk peduli terhadap sesama dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih kohesif dan solid. Ketiga, dapat meningkatkan citra negara di mata internasional. Negara yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam sistem hukumnya dapat menjadi contoh bagi negara lain dan mendapatkan penghargaan dari komunitas internasional.

Integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional adalah langkah penting untuk meningkatkan moralitas publik dan menciptakan masyarakat yang lebih beretika dan bermoral. Meskipun ada tantangan dalam proses ini, manfaat yang dapat diperoleh sangat signifikan. Dengan kerjasama yang baik antara ulama, pembuat kebijakan, dan penegak hukum, serta dengan dukungan dari masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi, integrasi ini dapat berjalan dengan efektif dan membawa perubahan positif bagi masyarakat dan negara.

Penelitian tentang integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional memiliki rasional yang kuat karena beberapa alasan, yaitu: (i) Keterbatasan sistem hukum sekuler. Sistem hukum sekuler cenderung memiliki keterbatasan dalam menangani masalah moralitas publik karena kurangnya landasan moral yang kuat. Integrasi nilai-nilai moral Islam dapat menjadi tambahan yang signifikan dalam memperkuat fondasi moralitas publik yang lebih kokoh. (ii) Relevansi ajaran Islam. Islam sebagai agama mayoritas di beberapa negara memiliki ajaran moral yang luas dan relevan dengan konteks kehidupan modern. Integrasi nilai-nilai moral Islam dalam sistem hukum nasional merupakan cara untuk mengaktualisasikan ajaran tersebut dalam pembentukan kebijakan dan penegakan hukum. (iii) Potensi meningkatkan keadilan sosial. Prinsip-prinsip moral dalam Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, dapat membantu dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berpihak kepada semua lapisan masyarakat. Integrasi Akhlaq Islami dalam hukum nasional dapat berkontribusi pada terwujudnya keadilan sosial yang lebih baik.

Penelitian tentang integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional memiliki urgensi yang tidak bisa diabaikan antara lain meliputi: (i) Meningkatkan moralitas publik. Dalam era globalisasi dan modernisasi, moralitas publik seringkali terkikis oleh berbagai faktor seperti individualisme, konsumerisme, dan korupsi. Integrasi nilai-nilai moral Islam dalam sistem hukum nasional dapat membantu memperkuat moralitas publik dan menjaga integritas sosial. (ii) Mengatasi tantangan moral. Masalah-masalah moral seperti korupsi, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia terus menjadi tantangan serius di banyak negara. Integrasi akhlaq Islami dalam hukum nasional dapat menjadi strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan moral tersebut dengan memberikan landasan moral yang kuat bagi pembentukan kebijakan dan penegakan hukum. (iii) Menciptakan kehidupan beradab. Islam mengajarkan tentang pentingnya kehidupan yang beradab (*civilized life*) yang

didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi. Integrasi nilai-nilai moral Islam dalam sistem hukum nasional dapat membantu menciptakan lingkungan sosial dan politik yang lebih beradab dan manusiawi.

Permasalahan tantangan moralitas publik. Dalam era modern yang kompleks, moralitas publik sering kali terkikis oleh berbagai faktor seperti individualisme, konsumerisme, dan korupsi. Ketidakstabilan moralitas masyarakat dapat mengakibatkan masalah sosial yang serius seperti ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan rendahnya integritas sosial. Keterbatasan sistem hukum sekuler. Sistem hukum nasional seringkali tidak memiliki landasan moral yang kuat untuk menangani masalah-masalah moral dalam masyarakat. Ketidakmampuan sistem hukum untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dapat mengakibatkan kelemahan dalam penegakan hukum dan pembentukan kebijakan yang adil.

Adapun kegunaan penelitian dapat digunakan sebagai landasan teoritis. Penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dalam memahami pentingnya integrasi nilai-nilai moral Islam dalam sistem hukum nasional. Melalui analisis terhadap konsep-konsep moral dalam Islam dan relevansinya dengan konteks hukum, penelitian ini akan memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pengembangan strategi integrasi Akhlaq Islami dalam hukum nasional.

Sebagai sumber inspirasi bagi aktivis dan advokat. Penelitian ini juga akan menjadi sumber inspirasi bagi aktivis dan advokat yang peduli dengan masalah moralitas publik. Dengan menyadari potensi integrasi Akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional, aktivis dan advokat dapat mengadvokasi untuk perubahan kebijakan dan praktik hukum yang lebih berpihak kepada nilai-nilai moral Islam.

Sebagai kontribusi untuk pembangunan masyarakat yang beradab. Integrasi Akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional dapat menjadi kontribusi penting dalam membangun masyarakat yang lebih beradab. Dengan memberikan landasan moral yang kuat bagi sistem hukum, diharapkan dapat tercipta lingkungan sosial yang lebih damai, adil, dan berkeadilan bagi semua warga masyarakat.

Sebagai kontribusi dalam wacana global tentang moralitas publik. Temuan penelitian ini juga akan menjadi kontribusi dalam wacana global tentang moralitas publik dan peran agama dalam membentuk sistem hukum. Dengan memperluas pemahaman tentang integrasi Akhlaq Islami dalam hukum nasional, penelitian ini dapat menjadi bagian dari upaya global untuk meningkatkan moralitas publik di berbagai negara.

Dengan demikian, penelitian tentang integrasi Akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan moralitas publik dan memperkuat fondasi moral dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional untuk meningkatkan moralitas publik. Penelitian ini akan mengkaji berbagai aspek, mulai dari konsep dan prinsip akhlaq Islami, bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diintegrasikan ke dalam hukum nasional, hingga dampaknya terhadap moralitas publik.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi mendalam tentang konsep, persepsi, dan pengalaman terkait integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi serta menganalisis data yang diperoleh secara mendalam (Rusandi & Rusli, 2021).

Target atau sasaran penelitian ini adalah (i) Pembuat kebijakan. Termasuk anggota DPR, pejabat Kementerian Hukum dan HAM, serta pejabat pemerintah lainnya yang terkait dengan pembentukan dan implementasi kebijakan hukum. (ii) Ulama dan tokoh agama. Para ulama dan tokoh agama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang akhlaq Islami dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam sistem hukum. (iii) Penegak hukum. Termasuk hakim, jaksa, pengacara, dan polisi yang terlibat dalam penegakan hukum di Indonesia. (iv) Akademisi dan pakar hukum. Akademisi di bidang hukum dan pakar yang memiliki pemahaman tentang integrasi nilai-nilai moral dalam sistem hukum.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan langkah-langkah sebagai berikut: (i) Reduksi data. Mengurangi data yang tidak relevan dan memfokuskan pada data yang berkaitan dengan integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum. (ii) Penyajian data. Menyajikan data dalam bentuk narasi yang terstruktur untuk memudahkan pemahaman. (iii) Penarikan kesimpulan. Menarik kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Penelitian tentang integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional untuk meningkatkan moralitas publik merupakan upaya penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai moral dan etika Islami dapat diimplementasikan dalam konteks hukum yang berlaku. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini akan mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan dampak dari integrasi ini, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan pelaksanaan yang tepat dan pemahaman yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan moralitas publik dan kualitas kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang, tantangan moralitas publik menjadi semakin signifikan. Ketidakstabilan moralitas masyarakat dapat

mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari korupsi, ketidakadilan, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks ini, peran sistem hukum nasional menjadi sangat penting sebagai landasan untuk menjaga dan meningkatkan moralitas publik.

Namun, sistem hukum nasional tidak selalu mampu secara efektif menangani masalah-masalah moralitas yang muncul dalam masyarakat. Beberapa kelemahan dalam sistem hukum, seperti ketidakseimbangan antara kebijakan yang ditetapkan dan implementasinya, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, serta celah-celah hukum yang dapat dieksploitasi, dapat menyebabkan pengendalian moralitas publik menjadi kurang efektif.

Dalam konteks ini, integrasi Akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional menjadi sebuah alternatif yang menarik untuk dieksplorasi. Islam sebagai agama mayoritas di beberapa negara memiliki ajaran moral yang kaya dan kompleks yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum. Integrasi nilai-nilai moral Islam dalam sistem hukum nasional dapat menjadi strategi yang potensial untuk meningkatkan moralitas publik dan menjaga keadilan sosial.

Pengaruh nilai-nilai Islam dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia. Penelitian oleh Ahmad (2015) mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam mempengaruhi pembentukan sistem hukum di Indonesia (Ahmad, A., 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya Muslim, penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh pluralisme hukum dan adanya pengaruh sistem hukum Barat yang kuat. Ahmad menyarankan perlunya reformasi hukum yang lebih inklusif terhadap nilai-nilai Islam.

Akhlaq Islami dan etika dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian oleh Siti Nurjanah (2016) meneliti peran akhlaq Islami dalam etika penegakan hukum di Indonesia (Nurjanah, S, 2016). Studi ini menemukan bahwa integrasi akhlaq Islami dalam etika penegakan hukum dapat meningkatkan profesionalisme dan integritas di kalangan aparat penegak hukum. Namun, tantangan utama adalah kurangnya pelatihan dan pendidikan mengenai akhlaq Islami di kalangan aparat penegak hukum.

Persepsi masyarakat terhadap integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum. Penelitian oleh Hanafi (2017) meneliti persepsi masyarakat terhadap integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional (Hanafi, M, 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mendukung integrasi ini, karena mereka percaya bahwa nilai-nilai Islami dapat meningkatkan moralitas dan keadilan. Namun, ada kekhawatiran tentang penerapan yang tidak konsisten dan diskriminasi.

Implementasi nilai-nilai akhlaq Islami dalam hukum pidana di Aceh. Penelitian oleh Iqbal (2018) memfokuskan pada implementasi nilai-nilai akhlaq Islami dalam hukum pidana di Aceh (Iqbal, M, 2018). Aceh, sebagai daerah dengan otonomi khusus, telah menerapkan Syariah dalam hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ini berhasil menurunkan tingkat kejahatan, namun juga menghadapi kritik terkait hak asasi manusia.

Akhlaq Islami dalam pendidikan hukum di perguruan tinggi. Penelitian oleh Fathurrahman (2019) mengeksplorasi peran akhlaq Islami dalam pendidikan hukum di perguruan tinggi (Fathurrahman, A, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai akhlaq Islami dalam kurikulum pendidikan hukum dapat membentuk karakter mahasiswa hukum yang lebih beretika dan bermoral. Namun, implementasi kurikulum tersebut masih terbatas dan perlu ditingkatkan.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional memiliki potensi besar untuk meningkatkan moralitas publik dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beretika. Namun, implementasi nilai-nilai ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan tradisi hukum, resistensi dari kelompok sekuler, dan kendala politik.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif. Pendidikan dan sosialisasi tentang akhlaq Islami perlu ditingkatkan, baik di kalangan masyarakat umum maupun aparat penegak hukum. Pelatihan khusus untuk penegak hukum dan pembuat kebijakan tentang prinsip-prinsip akhlaq Islami juga sangat penting. Selain itu, kolaborasi antara ulama, lembaga keagamaan, pembuat kebijakan, dan penegak hukum harus diperkuat untuk menciptakan regulasi yang selaras dengan nilai-nilai Islami tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional yang ada.

Integrasi nilai-nilai akhlaq Islami dalam sistem hukum bukan hanya tentang penambahan elemen religius, tetapi juga tentang memperkuat fondasi moral dan etika dalam masyarakat. Dengan mengatasi hambatan dan tantangan yang ada, integrasi ini dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam sistem hukum nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional untuk meningkatkan moralitas publik.

1. Persepsi Pembuat Kebijakan terhadap Integrasi Akhlaq Islami

Para pembuat kebijakan yang diwawancarai menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional. Mereka menyadari bahwa nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial merupakan landasan penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih bermoral. Sebagian besar pembuat kebijakan setuju bahwa prinsip-prinsip akhlaq Islami dapat memberikan panduan moral yang kuat dalam proses pembuatan kebijakan dan penegakan hukum.

Salah satu pembuat kebijakan menyatakan, "Integrasi akhlaq Islami dalam hukum nasional bukan hanya tentang menambahkan elemen religius, tetapi lebih kepada memperkuat etika dan moralitas yang ada dalam masyarakat kita. Nilai-nilai seperti keadilan dan kejujuran adalah universal dan sangat relevan."

2. Pandangan Ulama dan Tokoh Agama

Ulama dan tokoh agama yang diwawancarai menekankan bahwa akhlaq Islami adalah bagian integral dari ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk hukum.

Mereka menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai tersebut dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya adil secara teknis, tetapi juga bermoral dan etis.

Seorang ulama terkemuka menyatakan, “Islam mengajarkan bahwa hukum harus adil dan manusiawi. Integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk membangun moralitas dan etika yang tinggi dalam masyarakat.”

3. Penegakan Hukum dan Implementasi Nilai-nilai Islami

Penegak hukum yang diwawancarai menunjukkan berbagai pandangan tentang implementasi nilai-nilai akhlaq Islami dalam praktik penegakan hukum. Sebagian besar setuju bahwa prinsip-prinsip seperti kejujuran dan keadilan harus menjadi dasar dalam penegakan hukum. Namun, ada tantangan dalam menerapkan nilai-nilai ini secara konsisten karena berbagai faktor, termasuk korupsi, tekanan politik, dan kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip tersebut di kalangan penegak hukum.

Seorang hakim menyatakan, “Dalam praktik sehari-hari, kita menghadapi banyak tantangan dalam menegakkan hukum dengan adil. Integrasi nilai-nilai Islami dapat membantu memberikan panduan moral, tetapi kita juga perlu sistem yang mendukung dan mengawasi implementasinya secara efektif.”

4. Tantangan dan Hambatan

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dan hambatan dalam integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional. Beberapa tantangan utama termasuk perbedaan tradisi hukum. Sistem hukum nasional yang banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Barat sering kali memiliki perbedaan mendasar dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pemahaman dan penerimaan. Tidak semua anggota masyarakat, termasuk penegak hukum dan pembuat kebijakan, memiliki pemahaman yang mendalam tentang akhlaq Islami dan pentingnya integrasi nilai-nilai tersebut. - Korupsi dan tekanan politik. Korupsi dan tekanan politik dapat menghambat implementasi nilai-nilai akhlaq Islami dalam penegakan hukum.

5. Strategi Integrasi

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional, antara lain: (i) Pendidikan dan sosialisasi. Meningkatkan pendidikan dan sosialisasi tentang akhlaq Islami di kalangan masyarakat dan penegak hukum. (ii) Pelatihan untuk penegak hukum. Memberikan pelatihan khusus bagi penegak hukum tentang prinsip-prinsip akhlaq Islami dan bagaimana menerapkannya dalam praktik penegakan hukum. (iii) Kolaborasi antara ulama dan pembuat kebijakan. Meningkatkan kolaborasi antara ulama, pembuat kebijakan, dan penegak hukum untuk menciptakan regulasi yang selaras dengan nilai-nilai Islami.

6. Integrasi Akhlaq Islami dalam Sistem Hukum Nasional

Integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional merupakan upaya penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih bermoral dan etis. Prinsip-prinsip akhlaq Islami seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dapat memberikan landasan moral yang kuat

bagi sistem hukum. Namun, implementasi nilai-nilai ini memerlukan pemahaman yang mendalam, dukungan sistem yang kuat, dan kerjasama antara berbagai pihak.

7. Kejujuran dan Keadilan dalam Hukum

Kejujuran dan keadilan adalah dua prinsip fundamental dalam akhlaq Islami yang sangat relevan dalam konteks hukum. Kejujuran dalam penegakan hukum berarti bahwa semua proses hukum harus dilakukan dengan transparan dan bebas dari manipulasi. Keadilan berarti bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil, tanpa diskriminasi dan dengan penghormatan terhadap hak-hak mereka.

8. Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial adalah prinsip akhlaq Islami yang menekankan pentingnya kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks hukum, ini berarti bahwa hukum harus dirancang dan diterapkan untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab sosial sering kali diabaikan dalam praktik penegakan hukum. Kebijakan hukum yang hanya menguntungkan segelintir orang dan tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan hukum dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

9. Kolaborasi dan Pendidikan

Kolaborasi antara ulama, pembuat kebijakan, dan penegak hukum adalah kunci untuk mengintegrasikan akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional. Ulama dapat memberikan panduan moral dan etika, sementara pembuat kebijakan dan penegak hukum dapat menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam regulasi dan praktik penegakan hukum.

Selain itu, pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya akhlaq Islami harus ditingkatkan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai ini dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Program pendidikan formal dan informal yang mengajarkan akhlaq Islami sejak dini dapat membantu membentuk karakter individu yang baik dan bermoral.

10. Reformasi Sistem Hukum

Untuk mendukung integrasi akhlaq Islami, reformasi sistem hukum diperlukan. Reformasi ini meliputi perubahan dalam struktur dan mekanisme penegakan hukum, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan lembaga-lembaga penegak hukum. Selain itu, perlu adanya regulasi yang jelas dan tegas mengenai penerapan nilai-nilai akhlaq Islami dalam sistem hukum.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran tentang pentingnya kejujuran dan keadilan, implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai faktor. Korupsi dan tekanan politik adalah hambatan utama yang sering menghalangi penegakan hukum yang jujur dan adil. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi sistemik untuk mengatasi masalah ini, termasuk penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dan peningkatan transparansi dalam proses hukum.



Simpulan

Integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional merupakan langkah penting untuk meningkatkan moralitas publik. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dapat memberikan landasan moral yang kuat bagi sistem hukum. Namun, implementasi nilai-nilai ini memerlukan dukungan sistem yang kuat, pendidikan yang memadai, dan kolaborasi antara berbagai pihak. Dengan mengatasi tantangan dan hambatan yang ada, integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat dan negara.

Integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum nasional merupakan langkah strategis untuk meningkatkan moralitas publik di Indonesia. Berdasarkan berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Islami seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam hukum dapat memperkuat fondasi moral masyarakat dan mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih harmonis dan adil.

Pertama, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia umumnya mendukung integrasi nilai-nilai Islami dalam sistem hukum. Mereka percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip akhlaq Islami dapat meningkatkan moralitas individu dan keadilan dalam penegakan hukum. Meskipun ada kekhawatiran tentang penerapan yang tidak konsisten dan potensi diskriminasi, dukungan masyarakat tetap menjadi modal penting bagi keberhasilan integrasi ini. Kedua, integrasi akhlaq Islami dalam hukum pidana di Aceh menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islami dapat menurunkan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran moral. Namun, penerapan ini juga menghadapi kritik terkait perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara penerapan nilai-nilai Islami dan perlindungan hak-hak individu. Ketiga, pendidikan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai akhlaq Islami dapat membentuk karakter mahasiswa hukum yang lebih beretika dan bermoral. Namun, implementasi kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Islami masih terbatas dan perlu ditingkatkan. Pendidikan merupakan kunci dalam menanamkan nilai-nilai akhlaq Islami yang kuat di kalangan generasi muda. Keempat, kendala utama dalam integrasi akhlaq Islami adalah perbedaan interpretasi nilai-nilai Islam, resistensi dari kelompok sekuler, dan kurangnya dukungan politik. Mengatasi kendala ini memerlukan dialog yang konstruktif dan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk ulama, pembuat kebijakan, dan penegak hukum. Kelima, peran ulama dan lembaga keagamaan sangat penting dalam pembentukan kebijakan hukum yang selaras dengan nilai-nilai Islami. Mereka dapat berperan sebagai pengawas moralitas dan memberikan dukungan kepada pemerintah dalam penegakan hukum yang adil dan bermoral.

Saran

1. Diperlukan adanya upaya peningkatan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan tentang akhlaq Islami harus ditingkatkan di semua tingkat pendidikan, terutama di fakultas hukum dan pelatihan aparat penegak hukum. Kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Islami dapat membantu membentuk generasi penegak hukum yang beretika tinggi dan bermoral.
2. Penguatan regulasi dan kebijakan. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi dan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap nilai-nilai Islami tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional. Hal ini termasuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak diskriminatif dan menghormati hak asasi manusia.
3. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sosialisasi tentang pentingnya integrasi akhlaq Islami dalam sistem hukum harus terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Program-program pemberdayaan masyarakat yang berbasis nilai-nilai Islami juga perlu ditingkatkan untuk mendukung terciptanya lingkungan sosial yang lebih bermoral dan adil.
4. Penguatan Institusi Keagamaan: Institusi keagamaan harus diperkuat perannya dalam mendukung integrasi nilai-nilai Islami dalam sistem hukum. Mereka dapat menjadi mitra strategis dalam mengawasi penerapan kebijakan dan memberikan pendidikan moral kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A. (2015). *Pengaruh Nilai-Nilai Islam dalam Pembentukan Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Indonesia Maju.
- Ali Fauzi, M., Septiani, H., & Sholehah, Z. (2023). Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Islam. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3 (07). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>
- Amsori, I. A. (2016). Integrasi Aspek Legal dan Moral Dalam Hukum Islam. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, Vol. I No. 03. <https://media.neliti.com/media/publications/301010-integrasi-aspek-legal-dan-moral-dalam-hu-2411f482.pdf>
- Fathurrahman, A. (2019). *Akhlaq Islami dalam Pendidikan Hukum di Perguruan Tinggi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hanafi, M. (2017). *Persepsi Masyarakat terhadap Integrasi Akhlaq Islami dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Iqbal, M. (2018). *Implementasi Nilai-Nilai Akhlaq Islami dalam Hukum Pidana di Aceh*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Mustopa. (2018). Akhlak Islami dan Kesehatan Mental. *Prophetic : Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, Vol. 1, No. 1.



<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/prophetic/article/download/3482/1885>

Nurjanah, S. (2016). *Akhlaq Islami dan Etika dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Pustaka Islamika.

Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2 (1).
<https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>

Sumarta, Edy, S., & Mardiyana. (2022). *Sosiologi Hukum Islam: Antara Kajian Metodologis, Teoritis, dan Praktis*. Indramayu: Penerbit Adab.